



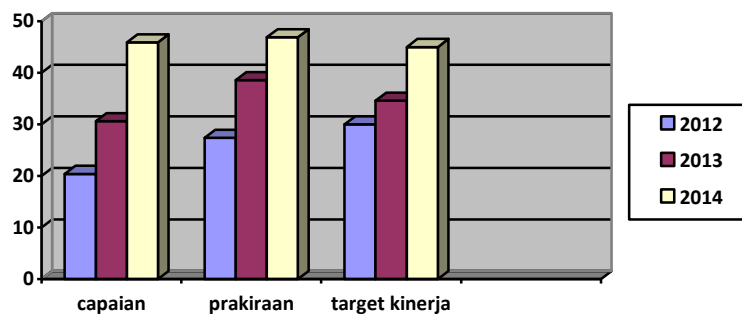
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. LETJEND S.PARMAN NO.17 , TELP.(0281) 891187, FAX : (0281) 894861
PURBALINGGA 53316

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2017



SKPD DINSOSNAKERTRANS

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, Januari 2016

KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURBALINGGA



NGUDIARTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 195908111985031016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015.....	7
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2017.....	17
BAB V PENUTUP.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda pokok Pembangunan di Kabupaten Purbalingga adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Untuk menunjang agenda pokok pembangunan tersebut harus didukung dengan penghasilan masyarakat yang memadai. Penghasilan masyarakat yang memadai akan terwujud apabila terdapat lapangan usaha ataupun lapangan usaha yang cukup serta suasana kehidupan yang nyaman dan sehat.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga berjumlah 884.633 jiwa yang terdiri dari laki laki 437.073 jiwa dan perempuan 447.610 jiwa (Purbalingga Dalam Angka 2016). Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai kekuatan dan modal pembangunan .Oleh karena itu usaha peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lainnya perlu dilakukan secara teliti dan terintegrasi.

Secara umum penduduk yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah penduduk yang berusia 15 – 64 tahun dan jumlahnya cukup banyak sebesar 640.827 jiwa. Sementara jumlah penganggur terdata sebanyak 11.756 jiwa (berdasar pencari Kartu AK. 1). Perusahaan yang tercatat sebanyak 412 buah, dengan daya tampung sebanyak 47.152 tenaga kerja. Namun demikian belumlah sebanding dengan jumlah penganggur yang cenderung terus naik dari tahun ketahun.

Permasalahan yang cukup menonjol terkait dengan tingginya angka pengangguran adalah kualitas dan produktifitas tenaga kerja masih rendah, sehingga kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perlu peningkatan mutu dan produktifitas bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki lapangan kerja atau bertransmigrasi.

Dengan demikian atas dasar permasalahan tersebut perlu disusun kebijakan program dan kegiatan yang secara bertahap dan berkesinambungan mampu mendorong secara efektif berkembangnya dunia usaha. Dan secara bersamaan pula mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan serta mendorong terwujudnya pemerataan pendapatan

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

➤ VISI

Terwujudnya kesejahteraan sosial untuk semua dan tenaga kerja serta masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan profesional.

➤ MISI

1. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam / sosial.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja.
4. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta pelaksanaan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dalam menjamin perlindungan tenaga kerja.
5. Meningkatkan pelayanan transmigrasi bagi masyarakat yang secara sukarela menjadi transmigran untuk menetap dan mendapatkan peluang terpenuhinya kesejahteraan diri dan keluarganya.
6. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administratif dinas.

Tujuan organisasi pemerintah daerah Dinsosnakertrans adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial untuk semua dan tenaga kerja serta masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan profesional.

Sasaran organisasi pemerintah daerah Dinsosnakertrans adalah

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Meningkatnya penanganan korban bencana alam / sosial.
3. Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan kerja.
4. Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis, dinamis.
5. Meningkatnya pelayanan transmigrasi .
6. Meningkatnya kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administratif dinas.

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian tujuan adalah :

1. Mengoptimalkan pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penanganan keluarga miskin serta meningkatkan penanganan terhadap terjadinya bencana alam/sosial.
2. Mengoptimalkan sumber daya dinas dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinsosnakertrans.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kkerja.
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis (industrial Harmony and Economi Development) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Adapun Indikator dari tercapainya tujuan tersebut , maka berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang dicapai meliputi sebagai berikut:

- a) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
- c) Besaran pencari kerja yang ditempatkan
- d) Penyelesaian hubungan industrial
- e) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek
- f) Besaran pemeriksaan perusahaan
- g) Besaran pengujian peralatan di perusahaan

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi ;

1.2.2. Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagai mana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

1.2.3. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- 1.2.4. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4693)
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737)
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4697)
- 1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga
- 1.2.8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinsosnakertrans

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016 .

Maksud disusunnya Renja SKPD adalah :

1. Sebagai pedoman para pelaksana pembangunan ataupun lembaga dan stakeholder yang lain.

2. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien. Adapun Tujuannya adalah :
 - a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
 - b) Menjamin terciptanya integrasi ,sinkronisasi,dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stokeholder yang lain.
 - c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan .
 - d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Berisi indikator beserta data capaian kinerja SKPD ;

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Menguraikan Isu Strategis, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Tahun 2017

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017

BAB V. PENUTUP

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

- i. Program Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni :**
 - 1. Fasilitas Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Kampung, Alokasi dana Rp 30.000.000,- Realisasi Rp 27.223.480,- (90, 74 %)** terdiri dari Kec. Bukateja : Ds. Karanggedang: 18 rumah , Ds. Penaruban : 7 rumah Kec. Kemangkon: Ds. Bakulan 30 rumah, Kec. Kr.moncol Ds. Tunjungmuli 30 rumah
- ii. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga :**
 - 1. Pembinaan Anak Terlantar di Luar Panti dan petirahan Anak,** telah dibina 41 anak SD di Kec. Kaligondang ke PSPA Satria Baturraden selama 25 hari, Alokasi dana Rp 50.605.000,- Realisasi Rp 49.800.000,- (98,40 %) Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan Dalam Daerah dan Makan Minum Rapat untuk efisiensi.
 - 2. Pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan AKM (Asistensi Keluarga Miskin)** Memberikan ketrampilan terhadap 10 WRSE dan 10 AKM di Desa Majatengah Kec. Kemangkon serta pemberian bantuan alat pertanian berupa Hand Tractor untuk AKM dan Mesin perontok padi dan selipan tepung untuk WRSE. Alokasi dana Rp. 49.820.000,- Realisasi Rp. 49.700.000,- (99, 75 %)

3. **Pendataan dan Penanganan PMKS** telah dilaksanakan pemulangan/pengiriman orang terlantar ke tempat asal maupun ke panti sosial sebanyak 120 orang. Alokasi dana Rp. 83.658.000,- Realisasi Rp 83.656.000,- (99, 99 %). Pos perjalanan dinas dalam daerah, sewa mobilitas dan makan minum rapat tidak dicairkan untuk efisiensi.
4. **Bimbingan Sosial dan Ketrampilan ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika), PGOT(Pengemis Gelandangan Orang Terlantar), Anak Jalanan dan Ex. Narapidana** memberikan Pembinaan Mental, Pengetahuan dan ketrampilan perbengkelan serta pemberian bantuan Peralatan Bengkel berupa Alat Kompresor terhadap 10 orang anak nakal. Alokasi dana Rp. 20.851.000,- Realisasi Rp.20.851.000,-(100 %)
5. **Validasi dan Verifikasi PBI JKN** Alokasi Dana Rp. 112.550.000,- realisasi Rp. 112.549.800,- (99, 99 %)
6. **Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang Cacat,** Terlayannya penderita cacat sebanyak 123 orang untuk mendapatkan alat bantu / Pelatihan dengan rincian :Krek 13 buah, Kursi Roda 75 buah, Alat bantu dengar 25 unit dan Pelatihan 10 orang . Alokasi dana Rp. 216.580.000,- Realisasi Rp.216.579.000,- (99,99 %)
7. **Porseni Penyandang Cacat,** Menyalurkan bakat dan kreativitas Penyandang cacat 25 orang dengan Alokasi dana Rp. 15.223.000,- Realisasi Rp.15.223.000,- (100 %)
8. **Bulan Bhakti Karang Taruna.** Meningkatkan rasa pengabdian dan nasionalisme generasi muda sebanyak 133 orang di Kecamatan Rembang Desa Penusupan berupa Aksi Donor Darah, Penanaman Pohon

Penghijauan, Pemberian Sembako kepada 50 orang dan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni. Alokasi dana Rp. 58.318.000,- Realisasi Rp. 58.308.000,- (99,98 %)

9. **Fasilitasi PKH** (Program Keluarga Harapan) Terdampinginya keluarga penerima bantuan PKH 24.389 KSM di 18 kecamatan dan terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana prasarana sekretariat PKH . Alokasi dana Rp. 241.111.000,- Realisasi Rp 228.125.480,- (94, 61 %) Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan dinas luar dan dalam daerah serta sewa sarana mobilitas untuk efisiensi.
10. **Fasilitasi Program KSBM** (Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Terbangunnya keserasian / keharmonisan antar warga di desa rawan konflik (Desa Tamansari, Ds. Majasari dan Ds. Pandansari Alokasi dana Rp. 2.600.000,- Realisasi Rp. 444.000,- (12, 07 %) Sisa dana perjalanan dinas luar dan dalam daerah serta mobilitas darat untuk efisiensi
11. **Fasilitasi Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Orang dengan Kecacatan Berat.**(Program pendampingn) Pemberian bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar kepada 156 Orang, Tercapainya kemampuan dan memelihara taraf kesejahteraan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati tarap hidup yg wajar, Aloaksi dana Rp 8.915.000,- Realisasi Rp 8.514.900,- (95,51 %)
12. **Pembinaan Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi.** PMKS /50 anak terlantar (5 panti), 45 anak (30 SDLB, 15 eks.Narkoba) yang memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Beras, Minyak, Gula Pasir). Alokasi Dana Rp 39.741.000,- Realisasi Rp 39.656.500,- (99,78 %) Sisa dana perjalanan untuk efisiensi.

iii. Program Penanggulangan Bencana Alam / Sosial

Menyalurkan bantuan berupa sembako/selimut/alat dapur kepada korban Bencana Alam/Sosial sebanyak 18 Kecamatan se Kab. Purbalingga. Alokasi dana Rp. 8.689.000,- Realisasi Rp. 2.769.000,- (31,86 %). Sisa belanja perjalanan dinas luar daerah untuk efisiensi.

iv. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja :

- 1. Pameran Bursa Kerja** Dana Rp. 18.382.000,- Realisasi 0,- (Tidak dilaksanakan karena pesertanya sangat sedikit dan sebagian besar sudah ikut Kabupaten Banyumas)
- 2. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD** terfasilitasi 53 orang alokasi dana Rp. 13.000.000,- Realisasi Rp 12.378.000,- (95,21 %),
- 3. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN,** Sasaran 145 orang dengan alokasi dana Rp. 6.755.000,- Realisasi 145 orang tenaga kerja, Rp. 6.595.000,- (97, 63 %) Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan dinas luar daerah untuk efisiensi.
- 4. Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja** dapat dilatih 20 Orang ketrampilan otomotif. Alokasi dana Rp. 45.000.000,- Realisasi Rp.39.517.500,- (87,81 %). Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan luar dan dalam daerah serta alat tulis kantor untuk efisiensi.

5. **Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik (DBH-CHT)** dengan sasaran 200 pekerja. Alokasi Dana Rp 62.871.000,- Realisasi Rp 59.361.000,- (94, 41 %
 6. **Pengelola BLK 1 paket Alokasi Dana Rp. 122.434.000,- Realisasi Rp. 113.985.875,- (93, 09 %)**.
 7. **Penyelenggaraan Pelatihan di BLK Alokasi Dana Rp. 310.000.000.- Realisasi Rp. 309.730.000.- (99, 91 %)**. Berupa Pelatihan otomotif 2 paket, pelatihan menjahit 2 paket, pelatihan las/welder 2 paket, dan pelatihan tata boga 2 paket untuk wil. Kab. Purbalingga Sisa dana yang tidak digunakan adalah untuk efisiensi
 8. **Pengadaan sarpras BLK** telah dilaksanakan dengan rincian hasil sebagai berikut : pembelian alat bengkel 1 paket, Alokasi dana Rp. 72.000.000,- Realisasi Rp 71.664.000,- (99,53 %)
- v. **Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial**
1. **Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**, selama 12 bulan dan 8 bulan dilaksanakan Survey ke 3 pasar Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan luar dan dalam daerah untuk efisiensi. Alokasi dana Rp. 26.347.000,- Realisasi Rp 25.045.500,- (95, 06 %)
 2. **Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja** .Sasaran 20 orang pekerja di lingkungan pabrik rokok (PT Sampoerna Kr.jambe Padamara) Alokasi dana Rp 48.243.000,-. Realisasi Rp 48.118.578,-(99,74 %)

3. Kelebihan anggaran biaya cetak, Jasa dokumentasi perjalanan dinas luar daerah dan instruktur untuk edisiensi.
4. **Pemberdayaan K-3** dengan sasaran 1 Kegiatan, dapat dilaksanakan Upacara yang dihadiri 250 orang dan menghimbau kepada tiap perusahaan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan Bulan K3 alokasi dana Rp. 6.735.000,- Realisasinya Rp. 6.735.000,- (100 %)
5. **Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial.** Alokasi Dana 29.611.000,- Realisasi Rp 20.333.000,- (68,66 %) Hasil : diperolehnya data pelaksanaan pembayaran UMK tahun 2014, tersosialisasinya UMK tahun 2015 (80 perusahaan) dan tersampainya informasi Pedoman Peraturan Ketenagakerjaan. Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan luar dan dalam daerah untuk efisiensi.
6. **Pengawasan Tenaga Kerja AKAD**, untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan hak dan kewajiban para pelaku proses produksi dan pekerja sebagai mitra usaha. Alokasi dana Rp 14.000.000,- Realisasi Rp 11.271.000,- (80,50 %). Sisa dana yang tidak digunakan adalah perjalanan luar daerah untuk efisiensi.

vi. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

1. **Penyediaan bahan jasa perkantoran**, melayani 49 PNS yang ada di Dinsosnakertrans Alokasi dana Rp. 311.451.000,- Realisasi Rp 279.976.638,- (89,89 %) Sisa dana yang tidak digunakan adalah kelebihan penyediaan dana rekening listrik dan air.

2. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**, melayani 49 PNS yang ada di Dinsosnakertrans Alokasi dana Rp 83.290.000,- Realisasi Rp 82.248.312,- (98, 74 %).
3. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**, dapat memelihara kendaraan roda empat 5 unit, komputer 18 unit, printer 13 buah, AC 4 unit dan Gedung 1 lokasi . Alokasi dana Rp. 271.000.000,- Realisasi Rp. 199.418.725,- (73, 58 %). Sisa dana yang tidak digunakan adalah dana anggaran kelebihan BBM karena hari libur dan pemeliharaan gedung (pengecatan) serta kelebihan anggaran suku cadang untuk efisiensi.
4. **Pemeliharaan TMP**, telah dilaksanakan pengecatan dan kebersihan TMP. Alokasi dana Rp. 26.043.000,- Realiasasi Rp 25.097.000,- (96, 36 %). Sisa dana yang tidak dilaksanakan adalah untuk efisiensi
5. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**, dapat memenuhi peralatan kantor antara lain, 3 Almari besi, 2 unit mesin absensi , 1 bh mesin potong rumput , 1 bh laptop, 2 bh monitor LCD, 3 bh printer. Alokasi dana Rp 72.946.000.- Realisasi Rp 31.627.000,- (43, 35 %). Sisa dana yang tidak digunakan adalah pengadaan server dan catridge akan dilaksanakan Tahun 2016.
6. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**, dapat menyertakan 1 paket untuk diklat, Alokasi dana Rp. 9.080.000,- Realisasi Rp. 9.080.000,- (100 %).
7. **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**. Alokasi Dana Rp 3.707.000,- Realisasi Rp 3.707.000,- (100 %).

BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

A. Isu Strategis Tahun 2017 :

1. Tingginya angka kemiskinan ;
2. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja ;
3. Rendahnya kualitas SDM ;
4. Pengangguran terus meningkat

B. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi dalam rangka :
 - a) Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja dan calon transmigran
 - b) Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan kerja
 - c) Terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pelatihan
2. Terciptanya kesempatan kerja yang seluas luasnya bagi pencaker dan mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negerisecara tertib, baik dan efisien.
3. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha.
4. Terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri , tidak memihak dan professional.
5. Terwujudnya penempatan transmigrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Tertanganinya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

C.Sasaran Tahun 2017

Sasaran kegiatan tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan ketrampilan bagi peserta pelatihan OTOMOTIF, MENJAHIT, LAS dan TATABOGA (tiga angkatan masing-masing 16 orang/ kelas)
2. Mengoptimalkan keberadaan BLK berupa penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, pengadaan sarpras BLK dan pembuatan Jaringan Air Bersih (Torn) dan Penambahan Daya Arus Listrik.
3. Memfasilitasi penempatan TK AKAD sebanyak 100 orang dan penempatan TK AKAN sebanyak 100 orang.
4. Memfasilitasi pertemuan antara pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja melalui Bursa Kerja yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan target penempatan 5000 orang.
2. Menyediakan data informasi ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan .
3. Pemeriksaan lingkungan kerja dan kesehatan kerja di 2 perusahaan dengan peserta 200 orang.
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan penempatan TK AKAD dan TK AKAN di perusahaan penyalur tenaga kerja.
5. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada anak terlantar, WRSE, PKH, KSBM dan PMKS pada umumnya.
6. Memfasilitasi masyarakat transmigrasi melalui sosialisasi ketransmigrasian 500 orang, menempatkan masyarakat melalui program transmigrasi sebanyak 30 KK
7. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
8. Peningkatan motivasi dan etos kerja serta pemeriksaan kesehatan pekerja pabrik (DBH-CHT)

D.Arah Kebijakan Tahun 2017

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang di tempuh adalah :

1. Mendorong penciptaan lapangan kerja seluas luasnya.
2. Memfasilitasi peningkatan ketrampilan, produktifitas dan penempatan tenaga kerja dengan program 3 in 1.
3. Pembinaan dan penerapan peraturan perundang undangan dibidang hubungan industrial.
4. Penegakan hukum ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Memfasilitasi pengerahan perpindahan dan penempatan transmigrasi.
6. Melaksanakan Pembinaan terhadap PMKS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2017

A. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017

Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan yang meliputi :

I. Program

Program pembangunan khususnya yang ditujukan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian sesuai dengan Renja tahun 2017 adalah :

1. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehab Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin.
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
4. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
6. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigran.

II. Kegiatan :

- Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehab Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin :
 1. Pembinaan Anak Terlantar Luar Panti dan Petirahan Anak.
 2. Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asstensi Keluarga Miskin (AKM).
 3. Pendataan dan Penanganan PMKS.
 4. Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Praktis PGOT, Anak Jalanan, ANKN dan Ex. Narapidana.
 5. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 6. Porseni Penyandang Cacat.

7. Bulan Bhakti Karang Taruna.
 8. Fasilitasi Progam Keluarga Harapan (PKH)
 9. Fasilitasi Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM)
 10. Fasilitasi Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Oran dengan Kecacatan Berat.
 11. Pembinaan Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi.
 12. Fasilitasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 13. Pelayanan Orang dengan Kecacatan Berat.
 14. Pembinaan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 15. Penjaringan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
 16. Validasi PBI JKN.
- Program Penanggulangan Bencana :
- Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.
- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 2. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 4. Pemeiharaan TMP.
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 7. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.
- **Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja**
1. Pameran Bursa Kerja

2. Fasilitasi Penempatan AKAD
3. Fasilitasi Penempatan AKAN
4. Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja
5. Pengelolaan BLK
6. Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja
7. Pengadaan sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
8. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik (DBH - CHT)
9. Penyelenggaraan Pelatihan di BLK
10. Bursa Kerja Khusus (BKK).

➤ **Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial**

1. Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
2. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja (DBH-CHT)
3. Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial
5. Pengawasan Tenaga Kerja AKAD

➤ Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigrasi

1. Sosialisasi Ketrasmigrasian.
2. Fasilitasi Pemindahan Transmigran

B. Pendanaan SKPD .

- Pagu indikatif SKPD Tahun 2017 : Rp 7.710.808.000,-

- Belanja SKPD :

a. Rencana belanja tidak langsung : Rp 3.804.182.000,-

b. Rencana belanja langsung : Rp 3.897.626.000,-

C. Matrik Renja SKPD Tahun 2017

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Purbalingga Tahun 2017 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini :

RENCANA KERJA TAHUN 2017
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN / BIDANG	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	TARGET 2017	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN Rp	OUTPUT / KELUARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BELANJA	7.701.808.000		
					BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.804.182.000		
					BELANJA LANGSUNG	3.897.626.000		
1.	EKONOMI				1 Pembinaan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi Sosial dan Penangan Keluarga Miskin	1.467.870.000		
		Jumlah PMKS yang tertangani melalui kegiatan pembinaan anak terlantar luar panti & petirahan anak	Terbinanya anak terlantar	55 anak kelas V / VI SD yg mengalami hambatan dlm belajar	a. Pembinaan Anak Terlantar di Luar Panti dan Petirahan Anak	50.605.000	Jumlah anak terlantar dan tertirah	
		Jumlah PMKS yang tertangani melalui kegiatan pembinaan WRSE	Terbinanya WRSE dan GAKIN	WRSE dapat dibina sebanyak 142 orang	b. Pembinaan Wanita Ra-wan Sosial Ekonomi (WRSE), Asistensi Keluarga Miskin (AKM)	49.820.000	Jumlah WRSE yang dapat dibina	
		Jumlah PMKS yang dapat dilatih melalui kegiatan pengiriman PMKS dan PSKS yang didata	Terlaksananya pengiriman PMKS dan pendataan PSKS	Masyarakat dapat dilatih 172 orang	c. Pendataan dan Pengiriman PMKS	106.928.000	Jumlah pemulangan orang terlantar ke daerah asal dan pelatihan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah masyarakat yang tertangani melalui kegiatan ketrampilan praktis	Terbinanya sejumlah pemuda di pedesaan	Masyarakat dapat dibina 10 orang	d. Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Praktis PGOT, Anak Jalanan, ANKN dan Ex. Napi	20.851.000	Jumlah masyarakat yang dibina	
		Jumlah anak cacat yang dibina dan diberi bantuan	Terbinanya penyandang cacat luar panti	Penyandang cacat yg mendapat bantuan sebanyak 10 orang	e. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	182.322.000	Jumlah penyandang cacat yang mendapat bantuan	
		Jumlah anak panti asuhan yang mengikuti OR	Terbinanya fisik dan mental penyandang cacat	Anak-anak panti asuhan dapat mengikuti OR 30 orang	f. Porseni Penyandang Cacat	15.223.000	Jumlah peserta olahraga	
		Jumlah peserta upacara yang hadir	Terbinanya generasi muda melalui keg. Karang taruna	Peserta upacara dapat hadir sebanyak 130 orang	g. Bulan Bhakti Karang Taruna (7 ~ 40)	68.318.000	Jumlah peserta upacara	
		Jumlah KK Miskin yang terfasilitasi untuk menerima bantuan program keluarga harapan	Terdampinginya KK miskin yang menerima bantuan keluarga harapan	Terciptanya penggunaan bantuan sesuai peruntukannya dan meningkatnya ekonomi keluarga penerima bantuan sebanyak 24,728 KSM	h. Fasilitasi PKH	241.111.000	Jumlah penerima bantuan yang terdampingi untuk menerima bantuan dari Kemensos RI	
		Desa yang rawan konflik	Terdapainya keharmonisan antar warga dalam gotong royong membangun kegiatan keserasian	3 Desa	i. Fasilitas Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM)	2.600.000	Jumlah desa yang terbina	

		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Tercapainya kemampuan dalam memelihara taraf kesejahteraan sosial dalam menikmati hidup yang wajar	155 orang yang terdiri dari 50 Lansia dan 105 cacat berat	j. Fasilitas Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Orang dengan Kecacatan Berat	8.915.000	Jumlah PMKS yang menerima bantuan
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Terwujudnya perlindungan sosial terhadap anak terlantar dalam panti	40 orang terlantar dan 10 orang lx Narkoba	k. Pembinaan Panti Sosial dan panti Rehabilitasi	100.000.000	Jumlah anak yang menerima bantuan
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Terpenuhinya operasional program PLTK dan KUBE	100 rumah dapat didampingi	l. Fasilitas Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dan Kelompok Usaha bersama (KUBE)	20.000.000	Jumlah rumah yang dipugar
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Terlayannya penyandang cacat berat luar panti	100 orang	m. Pelayanan orang dengan kecacatan berat	371.817.000	Jumlah Penca yang terlayani
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PSM	10 orang	n. Pembinaan Pengembangan Paguyuban Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM)	17.768.000	jumlah PSM yang terbina
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Masih banyak ditemui PGOT yang berkeliaran di jalan	240 orang	o. Penjarangan PGOT dan Tuna Sosial Lainnya	99.042.000	Jumlah PGOT dan Tuna Sosial yang terjaring
		Peningkatan pembinaan keluarga dan penanganan PMKS	Terfasilitasinya pengolahan data PIN JKN dan tersedianya data PBI JKN yang valid	18 kec	p. Validasi dan Verifikasi PBI JKN	112.550.000	Jumlah pengolahan data yang terbina

					2 Program Penanggulangan Bencana	8.689.000		
		Jumlah desa yang tertangani dalam kejadian bencana alam / bencana sosial		Bantuan dapat disalurkan ke 45 desa	~ Penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	8.689.000	Jumlah penyaluran korban bencana alam / sosial	
					3 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	686.579.000		
		Jumlah kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran yang dapat dilayani	Masih kurangnya bahan jasa perkantoran	Upaya pelayanan administrasi perkantoran di setiap tahunnya	a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	229.751.000	Jumlah pegawai yang dilayani	
		Jumlah pegawai yg ada dapat dibiayai melalui kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang harus dilak sanakan	Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksana-kan oleh 49 PNS	b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115.380.000	Jumlah pegawai yang dilayani	
		Jumlah sarpras dapat dipelihara melalui kegiatan Pemeliharaan Sarpras	Kurang terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Pemeliharaan sarpras dapat dilaksanakan dan sesuai ketentuan / kepentingannya sebanyak 32 kegiatan	c. Pemeliharaan Sarpras Kantor	271.000.000	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	

		Jumlah pemeliharaan dilakukan 1 tahun	dengan 1 orang tenaga penjaga TMP pemeliharaan kebersihan kurang optimal	Pemeliharaan TMP dapat dilaksanakan di setiap tahunnya agar tetap baik	d. Pemeliharaan TMP	33.603.000	Jumlah lokasi yang dipelihara	
		Jumlah pengadaan dapat memenuhi kebutuhan kantor	Belum terpenuhinya sarana prasarana	Pengadaan Almari Besi	e. Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	23.500.000	jumlah prasarana yang dipenuhi	
		Jumlah pegawai secara bertahap akan di diklat	masih banyak staf yang belum mengikuti pelatihan teknis / biasa	Diklat sampai menunjang kemampuan tugas sebagai PNS sebanyak 15 PNS	f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.500.000	Jumlah pegawai yang dilatih	
		Jumlah pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan	Nihil	Pemenuhan laporan dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja	g. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	5.845.000	Jumlah pelaporan yang dapat dipenuhi	
					4 Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.438.716.000		
		Jumlah perusahaan peserta pada pameran bursa kerja	masih banyak penganggur laki-laki yang tidak terserap di perusahaan yang ada di purbalingga	Perusahaan yang hadir pada bursa kerja 20 perusahaan	a. Bursa Kerja	25.012.000	Jumlah perusahaan yang mengikuti	
		Jumlah TK AKAD setelah diseleksi dapat difasilitasi	masih banyak penganggur yang berminat bekerja menjadi TK AKAD	Tenaga kerja AKAD ditempatkan 100 orang	b. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD	18.375.000	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	

		Jumlah TK AKAN yang difasilitasi	masih banyak penganggur yang berminat bekerja di luar negeri	Tenaga kerja AKAN ditempatkan 25 orang	c. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN	8.021.000	Jumlah tenaga kerja yg ditempatkan	
		Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih ketrampilan dan ditempatkan	Pengangguran yang ada tidak mempunyai ketrampilan sehingga tdk bisa memasuki pasar kerja	Calon tenaga kerja yang dilatih 20 orang	d. Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja (DBH-CHT)	75.000.000	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih	
				Terpenuhinya sarpras BLK	e. Pengelolaan Balai Latihan Kerja (DBH-CHT)	476.459.000		
		Jumlah sarpras dapat menunjang kegiatan di BLK	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana BLK	Secara bertahap pengadaan sarpras untuk BLK perlu diteruskan / dipenuhi 1 paket	f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	229.350.000	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	
		Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih ketrampilan sesuai kebutuhan pasar dan tenaga mandiri	Belum banyak calon tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan pasar	Otomotif, Menjahit, Las, Tata Boga	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH-CHT)	534.406.000	Jumlah calon2 tenaga kerja yang siap pakai dan mandiri	
		Jumlah tenaga kerja dapat diperiksa kesehatannya melalui kegiatan (DBH-CHT)	masih ada pekerja yg belum produktif dan penanganan kesehatan belum berjalan	Tenaga kerja yang dapat diperiksa 350 orang	g. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik	62.871.000	Jumlah tenaga kerja yang diperiksa	
		jumlah pencari kerja yang terlatih dan ditempatkan	Belum tercovernya peserta pelatihan di Dinas.	60 orang	h. Bursa Kerja Khusus	9.222.000	jumlah pencari kerja yang terlatih dan ditempatkan	

					5 Program Peningkatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	125.193.000		
		Jumlah pasar yang dapat disurvei melalui survey KHL	Bimbingan PHI di perusahaan belum dilaksanakan dan masih ada kasus perselisihan HI	Survey dilaksanakan di 3 pasar setiap tahunnya 7 kali masing-masing pasar	a. Fasilitas Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	26.347.000	Jumlah pasar yang disurvei	
			Meningkatnya produktifitas di tempat kerja	40 orang pekerja pabrik rokok	b. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja (DBH-CHT)	48.500.000	Jumlah pekerja yang dilatih	
		Jumlah tenaga kerja yg diserap untuk mengikuti upacara pembukaan pada kegiatan K3	Ahli K3 yang ada masih sangat terbatas	Hadir pada pelaksanaan upacara pembukaan 150 orang dan 15 perusahaan yang dipilih	c. Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3	6.735.000	Jumlah peserta upacara	
		Jumlah perusahaan yang dapat disosialisasi melalui kegiatan pemberdayaan HI	Perusahan belum paham sepenuhnya tentang hak dan kewajiban perush.	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan UMK 28 perush.	d. Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial	29.611.000	meningkatnya jumlah perush yg paham tentang Peraturan Ketenagakerjaan &UMK	
		Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terpantau	adanya tenaga kerja yang tidak tahu akan haknya sbg pekerja	2 perusahaan / 200 orang	e. Pengawasan Tenaga Kerja AKAD	14.000.000	Jumlah puersahaan dan tenaga kerja yg paham akan hak dan kewajiban yg sesuai dg perundang 2an TK	

5.					6. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigran	170.579.000		
		Jumlah masyarakat yang dapat dibina melalui kegiatan sosiali-sasi transmigrasi	Banyak masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian	Peserta sosialisasi transmigrasi 400 orang	a. Sosialisasi Ketransmigrasian	11.589.000	Jumlah peserta sosialisasi	
		Jumlah transmigran yang ditempatkan untuk menetap	Masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dapat ditempatkan untuk menetap sebagai transmigran sebanyak 20 KK	b. Fasilitasi Pemandahan Transmigrasi	158.990.000	Jumlah Kepala Keluarga yang difasilitasi	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan. Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga yaitu :

**“ PURBALINGGA MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAHLAK MULIA “**

Purbalingga , April 2016

KEPALA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURBALINGGA



MGUDIARTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590811 198503 1 016